

PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM MENANGGULANGI RADIKALISME

Pipit Widiatmaka¹, Arief Adi Purwoko², Oki Anggara³, Putri Handayani Lubis⁴

pipitwidiatmaka@iainptk.ac.id

^{1, 2, 3, 4} Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Pontianak

ABSTRACT

This study aims to determine the meaning of radicalism, the role of civic education in universities, and the role of civic education as a vehicle for multicultural education to anticipate the development of radicalism in universities. The type of research used is qualitative and uses library research methods. Data collection techniques using document studies and data analysis used content analysis. The results of the study indicate that radicalism is an ideology that is very threatening to the diversity that exists in Indonesia, until now this ideology has begun to develop in the world of education, especially in universities. Radicalism began to develop in universities because most of the students were colleges were gathering places for young people and were easily influenced by something new. The role of civic education in higher education is very important and much needed, considering that this course is personality development and moral education. Citizenship education can function as multicultural education so that these courses can open students' insight that Indonesia is a multicultural country and can depend on all existing differences so that radicalism in higher education can be overcome. Through civic education, it can also build the character of tolerance, through an effective learning process with character education strategies, namely moral knowing, moral loving, and moral doing. Educators at universities must supervise their students' activities in the university environment.

Keyword: Civic Education, Multicultural Education, Radicalism

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui makna radikalisme, peran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, dan peran pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan multikultural untuk mengantisipasi berkembangnya radikalisme di perguruan tinggi. Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif dan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan analisis data yang digunakan ialah analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa radikalisme merupakan paham yang sangat mengancam keberagaman yang ada di Indonesia, hingga saat ini paham tersebut mulai berkembang di dunia pendidikan khususnya di perguruan tinggi. Radikalisme mulai berkembang di perguruan tinggi karena sebagian besar mahasiswa karena perguruan tinggi tempat berkumpulnya para pemuda dan mudah dipengaruhi dengan sesuatu yang baru. Peran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi sangat penting dan sangat dibutuhkan, mengingat mata kuliah tersebut adalah mata kuliah pengembangan kepribadian dan juga merupakan pendidikan moral. Pendidikan kewarganegaraan dapat difungsikan sebagai pendidikan multikultural, sehingga melalui mata kuliah tersebut mampu membuka wawasan mahasiswa bahwa Indonesia adalah negara multikultural dan mampu merdeka di atas semua perbedaan yang ada, sehingga radikalisme di perguruan tinggi dapat ditanggulangi. Melalui pendidikan kewarganegaraan juga dapat membangun karakter toleransi, melalui proses pembelajaran yang efektif dengan strategi pendidikan karakter, yaitu moral knowing, moral loving, dan moral doing. Pendidik di perguruan tinggi diharuskan mengawasi kegiatan para mahasiswanya di lingkungan perguruan tinggi.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Multikultural, Radikalisme

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, agama dan lain sebagainya, sehingga tidak dipungkiri bahwa Indonesia disebut sebagai negara multikultural. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan suatu kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia, namun keberagaman tersebut bisa menimbulkan disintegrasi nasional apabila tidak mampu dirawat dan dijaga karena keberagaman rentan terhadap konflik. Hakikatnya sejak awal para *founding fathers* bangsa Indonesia telah menyadari akan keragaman bahasa, budaya, agama, suku dan etnis di Indonesia. Singkatnya bangsa Indonesia adalah bangsa multikultural, maka bangsa Indonesia menganut semangat Bhineka Tunggal Ika. Konsep Bhineka Tunggal Ika terlebih dahulu (Mahfud, 2011). Bhineka Tunggal Ika merupakan kalimar bijak yang dipelihara dan digunakan sebagai pedoman atau sumber kajian di masyarakat. *Bhineka Tunggal Ika* adalah kalimat yang tertulis dipita lambang negara Garuda Pancasila, yang berarti berbagai keragaman etnis, agama, adat-istiadat, bahasa daerah, budaya dan lainnya yang mewujudkan menjadi satu kesatuan tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia (Bedjo, 2007). Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan persatuan yang menjadi keinginan masyarakat Indonesia. Kunci yang sekaligus menjadi mediasi untuk mewujudkan cita-cita itu adalah toleransi. Toleransi adalah karakter yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia agar keberagaman di Indonesia dapat terjaga dengan baik.

Pasca reformasi Isu SARA menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan, karena banyak konflik yang dilatarbelakangi oleh isu tersebut. Pada dasarnya pasca reformasi konflik yang berbau SARA semakin meningkat, karena reformasi memberikan kebebasan yang tidak ada batasnya atau kebebasan yang berlebihan. Kebebasan tersebut ternyata dimanfaatkan

oleh kelompok atau organisasi radikal untuk menjalankan aksinya yaitu menolak Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Misal fitnah dan provokasi dari beberapa tokoh organisasi Al-Jama'ah Al-Islamiyah, seperti Abdullah Sungkar, yang mengatakan bahwa "Pancasila adalah doktrin-doktrin batil yang meracuni pikiran pemuda-pemuda Islam Indonesia. Kemudian Abu Bakar Ba'asyir menuding Pancasila sebagai rekayasa pihak Kristen/Katolik untuk menghancurkan institusi Islam di Indonesia (Hendropriyono, 2009). Pasca reformasi radikalisme mulai berkembang di seluruh lapisan masyarakat, yang berujung pada terjadinya tindakan terorisme di beberapa daerah. Fenomena ini sangat mengancam eksistensi keberagaman di Indonesia mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen.

Radikalisme di Indonesia mulai merambah ke lingkungan pendidikan, sehingga banyak siswa maupun mahasiswa terpengaruh dengan ideologi tersebut, dan pada akhirnya menolak ideologi Pancasila, yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam. Direktur Pencegahan BNPT (Brigadir Jenderal Hamidin) mengungkapkan bahwa "hingga tahun 2016 hasil penelitian BNPT yang bekerja sama dengan perguruan tinggi menunjukkan dari seluruh pelaku teror di Indonesia paling banyak dilakukan oleh orang yang berusia 21-30 tahun, angkanya mencapai 47 %. Dilihat dari segi pendidikan pelajar, tingkat SMA memiliki jumlah tertinggi, mencapai 63 %. Tingkat perguruan tinggi di posisi kedua dengan jumlah 16 %" (Widiatmaka, Pipit & Purwoko, 2021). Fenomena ini sangat miris mengingat banyak pemuda yang merupakan calon pemimpin Indonesia di masa yang akan datang terpengaruh dengan ideologi radikal dan menolak Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama dengan Kementerian

Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada tanggal 29 Februari 2016 menyelenggarakan kegiatan “Dialog Pencegahan Radikal Terorisme dan ISIS di Kalangan Perguruan Tinggi se-Jawa Tengah” di Universitas Diponegoro Semarang. Perguruan tinggi dipilih sebagai mitra strategis dalam upaya pencegahan terorisme, karena menurut Anas Saidi peneliti LIPI mengungkapkan bahwa temuan yang mengagetkan bahwa radikalisme ideologi telah merambah dunia mahasiswa khususnya melalui organisasi kemahasiswaan yang baru tumbuh pasca reformasi. Pasca reformasi organisasi kemahasiswaan dari kelompok Cipayung seperti PMII, HMI, GMNI, PMKRI, GMKI, dan lainnya telah kurang dominan dan digeser oleh kelompok organisasi kemahasiswaan yang rajin menanamkan ideologi radikal (Malik, 2017)

Perguruan tinggi menjadi tempat yang sangat efektif untuk menyebarkan ideologi radikal, karena perguruan tinggi adalah tempat berkumpulnya para pemuda dalam rangka menuntut ilmu. Di sisi lain, pemuda yang terpengaruh dengan ideologi radikal tersebut, akan berpotensi menjadi seorang teroris. Direktur Pencegahan BNPT, Brigadir Jenderal Hamidin mengungkapkan bahwa “hingga tahun 2016 hasil penelitian BNPT yang bekerja sama dengan perguruan tinggi menjelaskan alasan mengapa pemuda menjadi target utama rekrutmen menjadi anggota jaringan teroris, yaitu 1) Pemuda sedang dalam proses pencarian jati diri. Berdasar hasil riset *The United States Institute of Peace* pada tahun 2010, mengungkapkan bahwa 2.032 anggota jaringan Al-Qaeda adalah mahasiswa atau remaja yang mempertanyakan identitas dirinya, 2) Pemuda terlibat terorisme karena membutuhkan kebersamaan sehingga kelompok teroris pandai memanfaatkan remaja yang emosinya tidak stabil, 3) Pemuda memiliki hasrat ingin memperbaiki apa yang menurutnya tidak benar atau tidak adil, 4) Ideologi pemuda biasa dijejali dengan semangat perubahan, dan 5) Ada juga pemuda yang menjadi pelaku teror

lantaran ingin mencari sensasi dan kegagahan” (Widiatmaka, Pipit & Purwoko, 2021)

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa radikalisme yang sudah masuk ke dunia pendidikan khususnya di perguruan tinggi semakin mengkhawatirkan masa depan bangsa Indonesia, karena pemuda adalah pemegang estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Apabila pemuda (mahasiswa) terpengaruh dengan ideologi yang radikal masa depan keberagaman di Indonesia akan terancam punah. Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan keperibadian diharapkan menjadi ujung tombak untuk menanggulangi radikalisme di perguruan tinggi, sehingga keberagaman di Indonesia dapat terjaga dan terpelihara.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui makna radikalisme, peran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, dan peran pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan multikultural untuk mengantisipasi berkembangnya radikalisme di perguruan tinggi.

II. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen (buku, jurnal, dan prosiding) serta internet atau informasi yang terkait dengan penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data konten. Langkah-langkah analisis data konten ialah 1) menyatukan data yang dikumpulkan oleh peneliti, 2) melakukan pemilahan data, 3) pemberian tanda atau kode di setiap data, 4) menyederhanakan data yang diperoleh, 5) penarikan kesimpulan, dan 6) melakukan penarisan dari hasil penelitian (Moleong, 2021). Penelitian ini berusaha mengungkap peran pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan multikultural untuk menanggulangi paham radikalisme.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi, sehingga setiap program studi wajib memberikan mata kuliah tersebut kepada mahasiswa, meskipun program studi eksak, seperti matematika, kimia. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 37 ayat (2) menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Dasar tersebut merupakan ketentuan yang wajib diikuti oleh seluruh universitas, institut maupun sekolah tinggi di Indonesia. Pemerintah melalui Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional RI mengeluarkan Keputusan Nomor 267/ DIKTI/Kep/2000 tentang Penyempurnaan Garis-Garis Besar Proses Pembelajaran (GBPP) Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) Pendidikan Kewarganegaraan pada perguruan tinggi di Indonesia, pada pasal 3 dalam Keputusan Dirjen Dikti tersebut bahwa pendidikan Kewarganegaraan dirancang dengan maksud untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting untuk membangun karakter mahasiswa agar menjadi warga negara yang baik berdasarkan Pancasila. Sapriya mengungkapkan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi memiliki tujuan 1) dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab, 2) Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional secara kritis dan bertanggung jawab, dan 3) Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejujuran serta patriotisme

yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa (Widiatmaka, 2021).

Pada dasarnya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi sangat efektif untuk membangun karakter toleransi mengingat seluruh materi yang tercakup di dalam mata kuliah tersebut bersumber dari Pancasila (Widiatmaka, 2021). Di sisi lain, pendidikan kewarganegaraan juga dituntut untuk dapat membangun karakter yang berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia. Melalui mata kuliah tersebut mahasiswa dapat memahami bahwa Indonesia dibangun oleh founding fathers di atas perbedaan, seperti suku, agama, bahasa, ras, dan lain sebagainya. Perbedaan yang dibangun oleh founding fathers, saat ini mulai terancam karena banyak pemuda yang melakukan tindakan radikal untuk menolak Pancasila. Fenomena ini sangat mengkhawatirkan bagi masa depan Indonesia, karena generasi penerusnya melakukan tindakan-tindakan radikal yang bertentangan dengan Pancasila.

Pendidikan harus mampu memberikan panyadaran kepada masyarakat bahwa konflik bukan satu hal yang baik untuk dibudayakan. Selayaknya pula pendidikan mampu memberikan tawaran-tawaran yang mencerdaskan antara lain dengan cara mendesign materi, metode hingga kurikulum yang mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya sikap saling toleran, menghormati perbedaan suku, agama, ras, etnis dan budaya masyarakat Indonesia yang multikultural (Mahfud, 2011). Pada dasarnya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi membekali mahasiswa tiga kompetensi, sehingga sehingga tidak mudah terpengaruh dengan ideologi radikal dan tetap berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Kompetensi tersebut, yaitu 1) Civic knowledge, kompetensi ini membekali warga negara pengetahuan bagaimana untuk menjadi warga negara yang baik (good citizen) berdasarkan Pancasila, 2) Civic skill, kompetensi ini berkenaan dengan apa yang harus dapat dilakukan oleh mahasiswa bagi kelangsungan kehidupana berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila, yaitu keterampilan intelektual dan partisipasi, dan 3) Civic dispositions, kompetensi dalam ranah ini menuntut mahasiswa harus memiliki karakter yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila agar menjadi warga negara yang baik (good citizen), seperti karakter religius, karakter tanggung

jawab, karakter toleransi dan lain sebagainya (Nuryadi & Widiatmaka, 2022).

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Multikultural

Keberagaman di Indonesia tidak serta merta muncul dengan sendirinya, namun melalui proses yang panjang sehingga membentuk suatu kesatuan yang memiliki perbedaan latar belakang, yang kemudian kelompok tersebut dikenal dengan nama bangsa Indonesia (Widiatmaka et al., 2022). Cogan memaparkan bahwa masyarakat multikultural Indonesia tidak bisa dibangun secara *taken for granted* atau *trial and error*, sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, *integrated* dan *berkesinambungan*. Salah satu strategi yang bisa dilakukan dalam konteks tersebut adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan yang dimaksud dalam hal ini adalah pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas (*citizenship education*) yang memiliki perspektif kewarganegaraan dunia abad ke-21 yang terkenal dengan sebutan kewarganegaraan multidimensi yang salah satu cirinya memiliki karakteristik multikultural (Winataputra, 2012)

Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang memiliki posisi dan peran penting, karena memuat materi yang selalu menekankan dan membangun persatuan dan kesatuan di dalam perbedaan yang ada sehingga mata kuliah tersebut dapat difungsikan sebagai pendidikan multikultural. Ada beberapa pendekatan dalam proses pendidikan multikultural, yakni 1) Tidak lagi menyamakan pandangan pendidikan (*education*) dengan persekolahan (*schooling*), atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal, 2) Menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnis, 3) Pengembangan kompetensi dalam suatu kebudayaan baru biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, 4) Meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan, dan 5) Kemungkinan bahwa pendidikan (baik formal maupun non formal) meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan (Mahfud, 2011)

Pada dasarnya pendidikan multikultural dapat diimplementasikan di setiap jalur pendidikan, baik pendidikan formal, nonformal maupun informal, namun strategi dalam

mengimplementasikannya berbeda. Misal di jalur pendidikan informal, orang tua harus menjadi tauladan bagi anaknya dengan menunjukkan beberapa perbedaan yang ada di lingkungan sekitarnya kepada anaknya. Melalui proses tersebut, maka wawasan anak didiknya menjadi lebih luas dan faham akan keberagaman yang ada. Di pendidikan formal anak didik mendapatkan pelajaran tentang keberagaman melalui mata pelajaran PPKn dan Sejarah, sehingga melalui pendidikan formal anak didik akan memiliki wawasan yang lebih luas tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Di perguruan tinggi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu membuka pemahaman atau cakrawala mahasiswa bahwa Indonesia adalah negara yang multikultural dan bukan negara monocultural (Widiatmaka, 2022). Melalui proses tersebut mahasiswa secara sadar maupun tidak sadar akan tertanam mindset bahwa setiap warga negara Indonesia harus menerima kenyataan itu dan dituntut untuk menjaga dan memelihara keberagaman tersebut.

Radikalisme yang berkembang di perguruan tinggi pada dasarnya sangat mengancam keberagaman di Indonesia, baik sekarang maupun di masa depan, sehingga pendidikan multikultural menjadi ujung tombak untuk menanggulangi radikalisme di perguruan tinggi. Pendidikan multikultural untuk menanggulangi radikalisme harus memiliki strategi yang baik agar tujuan di dalam pembelajaran tersebut dapat tercapai secara maksimal. Banks memaparkan mengemukakan bahwa terdapat lima dimensi yang terkait dengan pendidikan multikultural, yaitu 1) *Content integration*, mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata kuliah/disiplin ilmu, 2) *The knowledge construction process*, membawa mahasiswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin), 3) *An equity pedagogy*, menyesuaikan metode pembelajaran dengan cara belajar mahasiswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik mahasiswa yang beragam baik dari segi ras, budaya ataupun sosial, 4) *Prejudice reduction*, mengidentifikasi karakteristik ras mahasiswa dalam menentukan metode pengajarannya, dan 5) *Empowering school culture*, melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berintegrasi dengan seluruh staf dan mahasiswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya

menciptakan budaya akademik (Budimansyah, 2008).

Pendidikan multikultural yang terintegrasi di dalam pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu strategi untuk menanggulangi radikalisme di perguruan tinggi, sehingga tidak dipungkiri di setiap program studi wajib mengajarkan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan kepada mahasiswanya (Rahng et al., 2022). Pendidikan multikultural pada dasarnya suatu proses untuk membangun karakter toleransi mahasiswa, melalui proses tersebut pendidikan multikultural dapat difungsikan sebagai deradikalisasi.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Multikultural untuk Membangun Sikap Toleransi

Radikalisme yang berkembang di seluruh lapisan masyarakat khususnya di perguruan tinggi menjadi tantangan pendidikan kewarganegaraan untuk menanggulungnya, mengingat peran pendidikan kewarganegaraan salah satunya adalah membangun sikap toleransi yang berdasarkan Pancasila (Adiansyah & Widiatmaka, 2022). Pada dasarnya pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sentral dalam menanggulangi radikalisme di perguruan tinggi, seperti yang dinyatakan oleh Amirsyah, yaitu “untuk membendung kuatnya arus radikalisme, maka pembentukan karakter dan jiwa nasionalisme merupakan suatu keniscayaan, diupayakan melalui pendidikan formal oleh pemerintah terhadap masyarakat sejak pra sekolah sampai perguruan tinggi dengan memberikan muatan materi pengetahuan pada kurikulum pendidikan meliputi mata pelajaran Pancasila, Kewarganegaraan, Kewiraan, Budi pekerti sesuai dengan tingkat pendidikan mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan universitas (Amirsyah, 2012).

Haryatmoko memaparkan bahwa secara alami sesungguhnya manusia lahir sebagai makhluk yang tidak toleran, maka toleransi tidak akan datang begitu saja dalam pemikiran dan kesadaran seseorang atau masyarakat. Sikap yang toleran merupakan akumulasi dari proses pembelajaran dan pembiasaan yang panjang. Orang yang tidak toleran pada dasarnya memang tidak pernah berdialog, tidak pernah belajar, dan tidak pernah menggunakan penalarannya untuk memahami dan menerima yang lain (Sauqi & Naim, 2008). Pada dasarnya

membangun sikap toleransi melalui jalur pendidikan formal atau di perguruan tinggi dibutuhkan pendidik yang memiliki pemahaman yang luas tentang keberagaman, memiliki karakter toleransi dan memiliki kompetensi sebagai seorang pendidik yang berkualitas (Widiatmaka, Pipit & Purwoko, 2021). Kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang pendidik menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 10 ayat 1 dibagi menjadi 4 (empat) kompetensi, yaitu 1) kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, 2) kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, 3) kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, dan 4) kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Pada dasarnya proses pembangunan karakter toleransi merupakan proses pendidikan karakter, sehingga para pendidik harus paham tentang strategi pendidikan karakter, agar karakter toleransi tersebut tertanam di dalam karakter mahasiswa. Abdul & Andayani (2012) menawarkan suatu strategi pendidikan karakter yang efektif untuk membangun akhlak mulia, khususnya karakter toleransi yaitu:

1. Moral knowing/learning to know

Tahapan ini merupakan langkah pertama dalam pendidikan karakter, tujuan tahapan ini diorientasikan pada penguasaan tentang nilai-nilai. Setiap individu harus mampu membedakan nilai-nilai akhlak mulia dan akhlak tercela serta nilai universal, memahami secara logis dan rasional pentingnya akhlak mulia dan bahaya akhlak tercela dalam kehidupan, serta mengenal sosok Nabi Muhammad SAW, sebagai figur teladan akhlak mulia melalui hadits-hadits dan sunahnya. Jadi pada dasarnya mahasiswa harus paham dan mengetahui bahwa karakter toleransi merupakan akhlak mulia dan perlu dibangun dan dikembangkan.

2. Moral loving/moral feeling

Tahapan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa cinta dan rasa butuh terhadap nilai-nilai akhlak mulia khususnya karakter toleransi, yang menjadi sasaran

pendidik adalah emosional, hati atau jiwa, bukan lagi akal, rasio dan logika. Pendidik menyentuh emosi sehingga tumbuh kesadaran, keinginan, dan kebutuhan, maka individu tersebut mampu berkata kepada dirinya sendiri “iya, saya harus seperti itu...” atau “saya perlu mempraktikkan akhlak ini...”, untuk mencapai tahapan ini pendidik bisa memasukinya dengan kisah-kisah yang menyentuh hati atau kompetensi. Melalui proses ini mahasiswa diharapkan dapat berintropeksi diri (muhasabah), sehingga, semakin tahu kekuarungannya

3. Moral doing/learning to do

Tahap Ini merupakan puncak keberhasilan pendidikan karakter, setiap individu tersebut mempraktikkan nilai-nilai akhlak mulia itu dalam perilakunya sehari-hari khususnya karakter toleransi. Individu tersebut akan menjadi semakin sopan, ramah, hormat, penyayang, jujur, disiplin, cinta, adil serta murah hati dan seterusnya. Selama perubahan akhlak belum terlihat dalam perilaku, individu tersebut harus memiliki setumpuk pertanyaan yang harus selalu dicari jawabannya. Tindakan selanjutnya adalah pembiasaan dan pemotivasian

Strategi pendidikan karakter tersebut pada dasarnya dapat diimplementasikan di

semua jalur pendidikan, entah itu formal, informal maupun nonformal. Apabila ketiga jalur pendidikan tersebut mampu bersinergi, maka karakter toleransi dapat terbangun dengan baik dan pada akhirnya akan menjadi suatu budaya. Pendidikan formal khususnya perguruan tinggi memiliki peran yang sentral dalam membangun karakter toleransi untuk menanggulangi radikalisme di perguruan tinggi, seperti yang diungkapkan oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu pentingnya peranan dunia pendidikan pelaku terorisme mulai memfokuskan perekrutan anggota baru di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, pesantren maupun universitas (Amirsyah, 2012). Perguruan tinggi menjadi ujung tombak untuk membangun karakter bangsa khususnya karakter toleransi, di sisi lain perguruan tinggi juga merupakan tempat yang mudah terkontaminasi ideologi radikal, karena tempat tersebut adalah tempat berkumpulnya para pemuda menuntut ilmu yang sebagian besar belum memiliki pondasi dalam kehidupannya sehingga mudah terpengaruh dengan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

IV. KESIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya dapat dimanfaatkan sebagai pendidikan multikultural untuk membuka wawasan mahasiswa bahwa kehidupan manusia di seluruh dunia khususnya di Indonesia memiliki perbedaan latar belakang khususnya perbedaan, suku, agama, ras dan lain sebagainya. Melalui pendidikan multikultural tersebut pada dasarnya dapat membangun sikap toleransi mahasiswa sehingga tidak mudah terpengaruh paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Melalui pendidikan multikultural tersebut yang terintegrasi di dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dapat mengantisipasi berkembangnya paham radikalisme yang merusak keberagaman di Indonesia, karena esensi pendidikan multikultural ialah untuk membangun mahasiswa menjadi warga negara yang

baik dan cerdas serta dapat menerima dan menghormati perbedaan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, M., & Andayani, D. (2012). Pendidikan Karakter Perspektif Islam, Bandung: PT. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Adiansyah, & Widiatmaka, P. (2022). Problematika Guru dalam Memberikan Bimbingan Konseling Siswa untuk Menumbuhkan Karakter Sosial Melalui Pembelajaran PPKn di Era Society 5.0. *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 7(1), 1–8. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v7.n1.2022.pp01-08>
- Amirsyah. (2012). Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi. In

- Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
- Bedjo, S. (2007). *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*. Sagung Seto.
- Budimansyah, D. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana, Universitas
- Hendropriyono, A. M. (2009). *Terorisme: Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*. Penerbit Buku Kompas.
- Mahfud, C. (2011). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Malik, A. (2017). *Waspada Benih Radikalisme di dalam Kampus*. Jalan Damai.
<https://jalandamai.org/waspada-benih-radikalisme-kampus.html>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nuryadi, M. H., & Widiatmaka, P. (2022). Keunggulan Youtube sebagai Media Pembelajaran untuk Menumbuhkan Sikap Nasionalisme Mahasiswa. *Journal of Civic Education*, 5(3), 356–367.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jce.v5i3.757>
- Rahnang, R., Widiatmaka, P., Aditya, F., & Adiansyah, A. (2022). Pembangunan Karakter Toleransi pada Anak Usia Dini dan Implikasinya terhadap Ketahanan Pribadi. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6), 6993–7002.
- Sauqi, A., & Naim, N. (2008). *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media Group.
- Widiatmaka, Pipit & Purwoko, A. A. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana untuk Membangun Karakter Toleransi di Perguruan Tinggi. *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 5(1), 171–186.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2021.005.02.8>
- Widiatmaka, P. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Ujung Tombak Pembangunan Karakter Pancasila di Perguruan Tinggi. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1(2), 176–185.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52738/pjk.v1i2.41>
- Widiatmaka, P. (2022). Strategi dalam Menjaga Eksistensi Kearifan Lokal sebagai Identitas Nasional Bangsa Indonesia di Era Disrupsi. *Pancasila Jurnal Keindonesiaan*, 2(2), 136–148.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.84>
- Widiatmaka, P., Purwoko, A. A., & Shofa, A. M. A. (2022). Rumah Radakng dan Penanaman Nilai Toleransi di Masyarakat Adat Dayak. *Dialog*, 45(1), 57–68.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47655/dialog.v45i1.584>
- Winataputra, U. S. (2012). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis). In *Bandung: Widya Aksara Press*.